

## **Manifestasi Sikap Politik Yesus Di Jemaat Imanuel Taripa**

Putri Chrisdwienjel Mbaloto  
[putrimbaloto01@gmail.com](mailto:putrimbaloto01@gmail.com)

*Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah (STT GKST) Tentena*

### **Abstract**

*The manifestation of Jesus' politics is a politics rooted in justice, love, liberation, and solidarity with the oppressed values that serve as a reference for the Imanuel Taripa Congregation in practicing their own approach to politics. Talking about politics refers to governance, whether in society or within the church, and also involves discussions about politicians, strategies, and power. This study employs a qualitative methodology to gain a deep understanding of the issues at hand. The choice of this approach is based on its relevance to the nature of the research topic, which focuses on interpretation and existing social dimensions. To strengthen the analysis, the author uses two data collection techniques: field research through interviews and literature studies. The political process within the church at the Imanuel Taripa Congregation takes place silently, including the regulation of church leadership structures, eventually leading to dominance over church governance. The state represents a form of power, and the government is a manifestation of developed authority. Therefore, the Imanuel Taripa Congregation, which is also part of the village community, inevitably interacts with the government. Although many events show politics being used selfishly to gain power, this paper seeks to reveal how Jesus' politics should function within the congregation so that no individual acts as if they hold greater authority.*

*Keywords:* *Immanuel Taripa Congregation; Jesus' politics*

### **Abstrak**

Manifestasi politik Yesus adalah politik yang bernali keadilan, kasih, pembebasan, dan keterpihakan pada kaum yang tertindas, yang menjadi referensi bagi Jemaat Imanuel Taripa untuk menjalankan politiknya. Bicara politik berarti tentang pemerintahan, bisa dalam masyarakat ataupun gereja, juga membahas tentang politisi itu sendiri, strategi, dan kekuasaan. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metodologi kualitatif guna memahami secara baik permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaianya dengan sifat topik penelitian yang berorientasi pada pemaknaan, serta dimensi sosial yang ada. Untuk memperkuat analisis, peneliti memanfaatkan dua teknik pengumpulan data, yakni penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Proses politik dalam gereja di Jemaat Imanuel Taripa berjalan secara diam-diam, yang di antaranya mengatur kepengurusan gereja, hingga akhirnya mendominasi struktur kepemimpinan gereja. Negara adalah bentuk dari kekuasaan, dan pemerintah adalah wujud dari kekuasaan yang dikembangkan, oleh karena itu Jemaat Imanuel Taripa yang di dalamnya juga adalah masyarakat desa, akan bersinggungan langsung dengan pemerintahan. Meskipun banyak peristiwa menunjukkan politik yang memanfaatkan kekuasaan secara egois, tulisan ini

memperlihatkan bagaimana politik Yesus seharusnya bekerja agar tidak ada individu yang seakan-akan lebih berkuasa.

Kata-kata kunci: Jemaat Imanuel Taripa; politik Yesus

---

## Pendahuluan

Kekristenan akan selalu berdampingan bersama dengan politik. Itu karena warga gereja yaitu orang-orang Kristen, juga merupakan warga masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Politik, pada hakikatnya, memiliki makna luhur sebagai upaya untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara sistematis demi mencapai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Namun, dalam realitas sosial politik yang terjadi, istilah “politik” sering kali diasosiasikan dengan hal-hal negatif seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, dan kepentingan pribadi<sup>1</sup>.

Persepsi ini menciptakan jarak antara politik dan nilai-nilai moral, termasuk di kalangan umat Kristen, yang kerap kali melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan tidak layak untuk dijamah oleh kehidupan spiritual. Padahal, kehidupan orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari realitas berbangsa dan bernegara. Ketika seseorang mengaku beriman dan aktif dalam kegiatan bergereja, secara otomatis ia juga dipanggil untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam konteks inilah, penting untuk melihat kembali bagaimana Yesus Kristus, sebagai teladan utama umat Kristen, menunjukkan sikap politik yang tidak berbasis pada kekuasaan duniawi, melainkan pada nilai-nilai Kerajaan Allah: keadilan, kasih, pembebasan, dan keberpihakan pada kaum tertindas<sup>2</sup>.

Sikap politik Yesus bukanlah politik kekuasaan, tetapi politik etis dan moral, yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan integritas dalam membangun kehidupan bersama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sikap politik Yesus menjadi relevan untuk direfleksikan dalam konteks gereja masa kini<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Adolf Bastian Simamora, ‘Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia’, *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 2.1 (2019), doi:10.36972/jvow.v2i1.16.

<sup>2</sup> Yan Yusuf Subu, ‘Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 7.1 (2019), pp. 1–15, doi:10.60011/jumpa.v7i1.85.

<sup>3</sup> A E Rerung and J Attu, ‘Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale’, *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4.1 (2023), pp. 1–17 <<https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>>.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahamata menyoroti pandangan warga gereja yang menganggap bahwa politik itu kotor dan penuh tipu daya, sehingga Tahamata mau menyadari warga gereja bahwa politik adalah bagian dari pelayanan gereja, yang harus dilakukan secara aktif, kritis, namun tetap etis dan dalam relasi yang baik dengan Allah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru, dengan menekankan pada perspektif yang belum banyak dikaji, dengan menitikberatkan pada pendekatan kristosentris dan moral. Dalam halnya pembentukan karakter warga jemaat, pendekatan kristosentris adalah pendekatan dengan meneladani kasih dan kerendahan hati Yesus, serta pendekatan moral adalah pendekatan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Peneliti jurnal juga menggaris bawahi bahwa setiap orang Kristen, sebagai warga gereja dan warga negara, tidak bisa menghindar dari tanggung jawab politik. Dengan kata lain, iman yang benar seharusnya menumbuhkan kesadaran politis yang bermoral dan membebaskan. Penelitian ini secara khusus akan menelaah bagaimana manifestasi sikap politik Yesus terlihat dalam kehidupan bergereja di Jemaat Imanuel Taripa, sebuah jemaat lokal yang berada di tengah dinamika sosial dan politik masyarakat Sulawesi Tengah. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana gereja sebagai persekutuan orang percaya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai politik Yesus dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, walaupun terjebak dalam pemikiran bahwa politik sekarang itu banyak tipu daya dan ketidakadilan<sup>4</sup>.

Ketika seseorang mengaku beriman dan aktif dalam kegiatan bergereja, secara otomatis ia juga dipanggil untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Gereja, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk membimbing jemaat agar dapat memaknai keterlibatan politik sebagai bagian dari panggilan moral dan spiritual, bukan sebagai sesuatu yang kotor atau harus dijauhi. Beberapa penelitian telah mencoba mengangkat isu ini dari berbagai sudut pandang. Salah satu kajian yang cukup representatif berasal dari tulisan Adi Putra, Charisal Manu, Gunar Sahari, dan Filmon Berek dalam jurnal mereka yang berjudul “Memahami Secara Teologis Politik dalam Gereja”. Dalam tulisan tersebut, para peneliti berupaya membangun kerangka teologis yang menjelaskan bahwa politik seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan sosial. Mereka memperkenalkan konsep politik teokrasi sebagai model partisipasi politik

---

<sup>4</sup> M F Tahamata and A Supratikno, ‘Peran Politik Gereja Dalam Tahun Politik 2024’, *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 13.2 (2024), pp. 227–48  
<<https://doi.org/10.51828/td.v13i2.386>>.

umat Kristen yang bersumber dari ajaran Kristus dan bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kasih, dan perdamaian. Melalui pendekatan normatif-teologis, mereka menekankan pentingnya peran gereja dalam menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan sosial, termasuk dalam ranah politik, merupakan wujud tanggung jawab iman<sup>5</sup>. Namun demikian, kajian tersebut cenderung bersifat konseptual dan belum banyak menyentuh realitas politik praktis yang terjadi di lingkungan gereja lokal. Pandangan jemaat terhadap keterlibatan politik, dinamika kekuasaan dalam tubuh pelayanan gereja, serta potensi konflik yang timbul akibat perbedaan pilihan politik, belum menjadi fokus utama dalam pembahasan mereka. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini berusaha mengangkat persoalan keterlibatan politik umat Kristen melalui pendekatan kontekstual dan empiris. Melalui studi kasus di Jemaat Imanuel Taripa, peneliti menyoroti bagaimana keterlibatan politik praktis, baik secara terbuka maupun terselubung, telah memengaruhi dinamika internal gereja. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat praktik-praktik politik tersembunyi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam tubuh gereja, yang kemudian menciptakan faksi-faksi dan merusak semangat persatuan sebagai satu tubuh Kristus. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuasaan yang berpotensi merusak esensi pelayanan rohani. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi literatur, penelitian ini menghadirkan gambaran yang lebih nyata mengenai kompleksitas hubungan antara gereja dan politik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sikap gereja yang netral dan imparsial, agar pelayanan tetap berjalan murni tanpa campur tangan kepentingan dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi sikap politik Yesus Kristus dalam kehidupan Jemaat Imanuel Taripa, khususnya dalam kaitannya dengan keterlibatan mereka dalam ranah politik. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana nilai-nilai politik Yesus seperti keadilan, kasih, pembebasan, diterapkan dalam praktik kehidupan berjemaat sekaligus bernegara. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa banyak umat Kristen yang masih memandang politik sebagai sesuatu yang negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai iman, sehingga menciptakan perbedaan antara

---

<sup>5</sup> Adi Putra and others, ‘Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja’, *Saint Paul’S Review*, 3.1 (2023), pp. 78–92, doi:10.56194/spr.v3i1.40.

spiritualitas dan tanggung jawab kewarganegaraan<sup>6</sup>. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas relasi gereja dan politik, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi jemaat dan pemimpin gereja untuk terlibat aktif dalam membangun tatanan sosial politik yang lebih adil dan manusiawi, dengan melihat teladan politik Yesus.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk memahami secara komprehensif berbagai permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks sosial yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menggabungkan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan khusus atau terlibat langsung dalam isu yang diteliti, termasuk tokoh gereja, majelis jemaat, dan anggota masyarakat desa yaitu. Wawancara ini dirancang untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman informan terkait politik Yesus dan praktiknya di Jemaat Imanuel Taripa. Di sisi lain, studi literatur digunakan untuk melengkapi data dengan merujuk pada berbagai sumber tertulis. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga memperkuat analisis dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan dan narasi langsung para informan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang utuh, mendalam, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan literatur saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual. Hasilnya diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi gereja dan masyarakat dalam memahami politik Yesus serta penerapannya dalam kehidupan berjemaat.

## Hasil dan Pembahasan

Pemahaman politik di Jemaat Imanuel Taripa masih didominasi oleh pandangan yang ambivalen, sebagaimana tercermin dalam berbagai

---

<sup>6</sup> James, ‘ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya Partisipasi Orang Kristen Dalam Perpolitikan Di Indonesia’, *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 2.2 (2016), pp. 187–91.

pernyataan jemaat yang menegaskan bahwa “sebenarnya politik itu bagus-bagus saja”, “sebenarnya politik itu tidak negatif”, serta “sebenarnya politik itu sifatnya baik, tergantung dari individu itu sendiri”. Pandangan semacam ini menunjukkan adanya kesadaran kritis di kalangan jemaat mengenai potensi politik sebagai sarana kebaikan, meskipun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praksis kehidupan berjemaat. Di satu sisi, masih terdapat keraguan untuk secara aktif mempraktikkan politik dalam konteks kekristenan, yang umumnya dimaknai secara negatif akibat realitas praktik politik yang sering diwarnai oleh kepentingan pribadi, kompromi moral, dan polarisasi sosial. Meski demikian, teologi politik Yesus yang berlandaskan pada nilai keadilan, kasih, pembebasan, serta keberpihakan terhadap kaum tertindas sejatinya dapat menjadi paradigma dan tujuan praksis politik Kristen. Pendekatan politik yang diilhami oleh teladan Kristus ini hendaknya tidak hanya dipahami secara konseptual atau berhenti pada tataran wacana teologis dan khutbah, melainkan diinternalisasi sebagai landasan etis dan praktis dalam memberikan suara yang relevan serta konstruktif di ruang publik<sup>7</sup>.

Gereja, dalam hal ini Jemaat Imanuel Taripa, memiliki tanggung jawab untuk menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai panduan utama yang memengaruhi partisipasi dan sikap jemaat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Walaupun terdapat variasi pemahaman di antara anggota jemaat terkait apakah Yesus berpolitik dan bagaimana menafsirkan tindakan-tindakan Yesus dalam konteks pelayanan maupun tanggapan-Nya terhadap kekuasaan, dinamika ini mencerminkan proses dialektika antara nilai-nilai Kekristenan yang ideal dan realitas praktik politik di masyarakat. Gereja berupaya mengambil posisi netral secara institusional dalam kancang politik praktis, tetapi secara substantif tetap menolak sikap apolitis. Melalui fungsi profetisnya, gereja berperan sebagai penjaga moral sosial dengan menekankan pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan pemeliharaan kesatuan umat di tengah keberagaman dan dinamika politik yang tidak terelakkan<sup>8</sup>. Pendekatan moderat dan reflektif tersebut selaras dengan teladan Yesus yang mengedepankan pelayanan, keadilan, dan kerendahan hati dalam menghadapi kompleksitas kekuasaan dan dinamika sosial politik, sehingga Jemaat Imanuel Taripa mampu mewujudkan keseimbangan antara keterlibatan sosial yang bertanggung jawab yakni menghadirkan suara profetis dan tindakan kasih di

---

<sup>7</sup> Nikarni Zai and Junidar Gulo, ‘Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih’, *Imitatio Christo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1.1 (2024), pp. 30–45, doi:10.63536/imitatiochristo.v1i1.4.

<sup>8</sup> Dismas Kwirinus, ‘Awam Politis Dan Tugas Kritis-Profetis’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 11.2 (2023), pp. 96–122, doi:10.60011/jumpa.v11i2.138.

tengah masyarakat serta komitmen menjaga kemurnian iman dan persekutuan dalam Kristus. Strategi ini dapat menjadi model yang relevan bagi gereja-gereja lain dalam memosisikan diri secara kritis, reflektif, sekaligus proaktif di tengah tantangan zaman yang terus berkembang<sup>9</sup>.

### **Mayarakat Onda'e dan Politik**

Masyarakat *To Onda'e*, yang saat ini secara mayoritas mendiami Desa Taripa, merupakan bagian integral dari komunitas *To Pobare'e* yakni kelompok etnis yang secara historis bermukim di wilayah dataran tinggi di sebelah Timur Danau Poso. Identitas kultural masyarakat *Onda'e* dicirikan oleh watak keras, sikap tanpa kompromi, dan keteguhan hati yang telah diwariskan sejak generasi nenek moyang. Sifat khas yang menonjol dalam karakter mereka adalah *mengkoyuyu*, yakni kecenderungan kepala batu atau sikap keras kepala yang cenderung menolak perubahan dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang telah lama tertanam dalam kehidupan bersama. Karakter ini, meskipun mengandung kekuatan dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya, juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika politik modern.

Keberadaan politik di tengah masyarakat *Onda'e* menghasilkan dialektika antara nilai-nilai tradisional dan penetrasi nilai-nilai serta praktik-praktik baru yang datang dari luar. Bagi masyarakat *Onda'e*, politik memang bukan sesuatu yang dianggap tabu atau dihindari, melainkan masih dipahami sebagai sarana kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menjaga tatanan sosial yang harmonis. Namun di sisi lain, adanya kecenderungan politik modern yang didominasi oleh logika perubahan cepat, kompromi, dan negosiasi seringkali berbenturan dengan prinsip kemandirian, idealisme, dan keteguhan nilai yang dipegang teguh oleh komunitas *Onda'e*<sup>10</sup>. Situasi ini memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang makna, tujuan, dan dampak nyata politik dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi ketika praktik politik kontemporer sering dipersepsi identik dengan ketidakjujuran, sikap tidak adil, bahkan eksploitasi yang merugikan masyarakat secara luas.

Di tengah realitas ini, peran gereja menjadi sangat krusial sebagai institusi yang mampu menjadi jembatan untuk merekonsiliasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas, termasuk dalam hal pemahaman dan

---

<sup>9</sup> Yuliana Pasambaka, ‘Wawancara Tentang Teologi Politik Di Jemaat Imanuel Taripa’ (wawancara pribadi, 2025).

<sup>10</sup> Kristofel Tokede, ‘Wawancara Tentang Strategi Politik Yesus Dalam Konteks Jemaat’ (wawancara pribadi, 2025).

praktik politik. Gereja dapat membantu masyarakat *Onda'e* menafsirkan dan memaknai politik secara lebih arif, adil, dan etis sesuai dengan nilai-nilai kekristenan misalnya melalui dorongan untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, partisipatif, dan inklusif<sup>11</sup>. Meskipun sebagian masyarakat *Onda'e* mulai terlibat aktif dalam dunia politik, fenomena ini juga memunculkan segmentasi atau kubu-kubu di antara mereka. Namun hal ini tidak serta-merta menghilangkan rasa keutuhan dan komitmen kolektif untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Sebab, perilaku berpolitik masyarakat *Onda'e* tetap sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang menempatkan kepentingan komunal, kebersamaan, dan solidaritas sebagai inti kehidupan bermasyarakat.

Struktur sosial yang kuat, rasa persatuan yang tinggi, dan ikatan kekerabatan yang erat menjadi fondasi utama yang merekatkan seluruh anggota komunitas, sehingga meskipun dalam praktik politik terbentuk polarisasi atau kelompok-kelompok, semangat untuk memelihara kebersamaan dan menegakkan nilai-nilai luhur tradisional tetap menjadi prioritas. Tegasnya, masyarakat *Onda'e* bukanlah kelompok yang anti terhadap perubahan ataupun perkembangan politik, melainkan komunitas yang secara selektif dan bijaksana menilai serta mengadopsi unsur-unsur baru demi kemaslahatan dan keteraturan hidup bersama. Proses ini pada akhirnya membuktikan bahwa politik dalam perspektif masyarakat *Onda'e* adalah instrumen sosial untuk meneguhkan identitas budaya, memperjuangkan aspirasi kolektif, dan melestarikan kohesi sosial di tengah arus perubahan zaman.

Partha Chatterjee, melalui konsep politik hibrida, menegaskan bahwa relasi kekuasaan di negara-negara berkembang tidak pernah berlangsung secara tunggal dan terpusat melalui institusi-institusi formal negara, melainkan dijalankan melalui percampuran yang dinamis antara lembaga negara dengan struktur tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, negara bukanlah satu-satunya pemegang otoritas dan pengatur tatanan sosial, melainkan harus berbagi ruang, peran, dan pengaruh dengan berbagai aktor non-negara seperti tokoh adat, pemimpin agama, organisasi sosial, hingga lembaga internasional. Pola interaksi yang terbentuk dapat berupa sinergi, negosiasi, bahkan kompetisi, di mana setiap aktor saling memengaruhi dan terkadang juga saling membatasi kekuasaan masing-masing. Chatterjee berargumen bahwa, terutama di kawasan yang memiliki tradisi dan masyarakat

---

<sup>11</sup> Grets Janaldi Apner, ‘Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia’, *Jurnal Teologi Cultivation*, 6.1 (2022), pp. 1–22, doi:10.46965/jtc.v6i1.709.

adat yang kuat, pengembangan tata pemerintahan tidak dapat sekadar meniru model institusi politik Barat, karena masyarakat lokal telah memiliki sistem pengaturan kehidupan bersama berdasarkan adat, kearifan lokal, maupun mekanisme sosial yang diwariskan secara turun-temurun<sup>12</sup>.

Dalam konteks masyarakat *Onda'e* di Desa Taripa, teori politik hibrida Chatterjee memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena keterbukaan terhadap politik modern tanpa harus melepaskan jati diri budaya lokal. Masyarakat *Onda'e*, meski sangat memegang teguh sistem nilai dan tradisi, tidak lantas menolak kehadiran atau keterlibatan dalam ranah politik, mereka justru memilih untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik politik dengan norma serta aturan adat yang telah eksis sebelumnya. Proses ini menciptakan tatanan politik yang bersifat lokal hibrida, di mana dinamika politik negara bertemu dengan kebijakan dan regulasi adat, membentuk sistem sosial yang unik dan kontekstual. Negara atau representasi kekuasaan formal serta tradisi lokal saling membentuk, memodifikasi, dan mengadaptasi satu sama lain, sehingga muncul bentuk pemerintahan dan pengelolaan kehidupan masyarakat yang lebih diterima dan efektif secara sosial.

## Hasil Penelitian

Keterlibatan politik dalam kehidupan gereja menciptakan tantangan tersendiri bagi kelangsungan pelayanan yang seharusnya berfokus pada nilai-nilai kerohanian. Ketika jemaat, terutama tokoh-tokoh gereja atau anggota majelis, terjun ke dalam dunia politik praktis, dampaknya seringkali mengganggu proses pelayanan.

Kepentingan politik yang dibawa ke dalam gereja tidak jarang memengaruhi suasana peribadatan, di mana kegiatan rohani yang seharusnya menjadi momen untuk memperdalam iman justru berpotensi dimanfaatkan sebagai ajang kampanye terselubung. Oknum-oknum tertentu yang dengan leluasa memanfaatkan posisi dan otoritas mereka di gereja untuk mendukung agenda politik pribadi, sehingga merusak esensi pelayanan yang seharusnya tulus dan bebas dari kepentingan duniawi<sup>13</sup>. Selain itu, muncul juga kelompok-kelompok tersembunyi. Kelompok ini terbentuk akibat perbedaan pandangan politik di antara jemaat, dan juga terbentuk dari beberapa individu yang

---

<sup>12</sup> Kevin P Clements, ‘Political Hybridity and Human Security in Post-colonial and Post-conflict State Building’, in *Human Security in World Affairs: Problems and Opportunities*, ed. by A K Lautensach and S W Lautensach, 2nd edn (BCcampus & UNBC, 2020) <<https://opentextbc.ca/humansecurity/chapter/political-hybridity/#8.6>>.

<sup>13</sup> Royke Lantupa Kumowal, Sekolah Tinggi, and Teologi Anderson, ‘ATAS DAMPAKNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN JEMAAT’, no. April (2025), pp. 52–73.

memiliki otoriter kekuasaan dalam struktur gereja yang pilihannya sama dengan kelompok-kelompok yang ada, sehingga masing-masing pihak berusaha mempromosikan pilihannya tanpa terang-terangan. Persaingan antar kelompok ini menciptakan dinamika tersendiri dalam gereja, di mana semangat persatuan sebagai satu tubuh Kristus terkadang tergantikan oleh loyalitas terhadap pilihan politik tertentu. Situasi ini semakin rumit ketika gereja, yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari hiruk-pikuk politik, justru terjebak dalam permainan kekuasaan.

Jika tidak dikelola dengan bijak, keterlibatan politik dalam gereja bukan hanya mengganggu pelayanan, tetapi juga berpotensi merusak citra gereja sebagai lembaga yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kasih dan persatuan. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk menetapkan batasan yang jelas antara aktivitas rohani dan politik, agar pelayanan tetap berjalan murni demi kemuliaan nama Tuhan.

Permasalahan keterlibatan politik dalam gereja yang mengganggu pelayanan dapat dipahami melalui teori *Structural Conflict Theory* yang dijelaskan oleh Afolabi (2021). Teori ini menunjukkan bahwa konflik dalam gereja bukan sekadar persoalan individu, melainkan hasil dari struktur otoritas yang timpang dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Ketika tokoh-tokoh gereja atau anggota majelis membawa agenda politik praktis ke dalam pelayanan, mereka seringkali memanfaatkan posisi dan otoritas yang melekat pada struktur gereja untuk mendukung kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini menciptakan ketegangan yang merusak esensi pelayanan, yang seharusnya berfokus pada nilai-nilai kerohanian dan persatuan jemaat.

Struktur gereja, baik yang bersifat episkopal, kongregasional, maupun presbiterian, memiliki potensi konflik tersendiri. Misalnya, dalam sistem episkopal, otoritas yang terpusat pada seorang uskup dapat disalahgunakan untuk mengadvokasi kepentingan politik tertentu. Sementara itu, dalam sistem kongregasional, demokrasi yang seharusnya melibatkan seluruh jemaat justru dapat dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tersembunyi yang ingin mendominasi arah gereja. Afolabi menegaskan bahwa konflik semacam ini muncul karena kekuasaan dalam gereja seperti kekuasaan spiritual, finansial, dan intelektual, yang seringkali tidak dikelola dengan transparan, sehingga memicu persaingan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa konflik kepemimpinan sering diperparah oleh sikap otoriter, intoleransi terhadap perbedaan pendapat, dan miskomunikasi antara pemimpin dan jemaat.

Ketika tokoh gereja menggunakan otoritasnya secara sepihak untuk memaksakan agenda politik, jemaat yang merasa tidak dihargai mungkin membentuk kelompok-kelompok tersembunyi sebagai bentuk perlawan.

Permasalahan ini sesuai dengan *Structural Conflict Theory* bahwa konflik adalah produk dari ketidaksetaraan struktural, di mana sebagian pihak merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Solusi yang diajukan Afolabi adalah perlunya gereja menetapkan batasan yang jelas antara aktivitas rohani dan politik, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pelatihan manajemen konflik bagi para pemimpin gereja juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan demi kemuliaan Tuhan, bukan kepentingan dunia. Dengan demikian, gereja dapat mengurangi dampak negatif politik praktis sekaligus mempertahankan integritasnya sebagai lembaga yang mengedepankan kasih dan persatuan<sup>14</sup>.

Keterlibatan politik dalam kehidupan gereja menempatkannya pada posisi strategis sebagai mediator yang bertugas menjaga keutuhan jemaat. Gereja di sini bersikap netral dan imparsial, tidak memihak kelompok mana pun, melainkan berfokus pada upaya memelihara harmoni di tengah keberagaman pandangan politik yang ada. Meskipun pengaruh politik tidak dapat dihindari sepenuhnya, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa nilai-nilai kerohanian tetap menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi antarjemaat.

Gereja, sebagai institusi yang memiliki pengaruh sosial dan moral yang penting, seringkali ditempatkan pada posisi strategis sebagai mediator dalam konflik internal jemaat, terutama ketika perbedaan pandangan politik mengancam keutuhan komunitas. Dalam menjalankan peran ini, gereja dituntut untuk bersikap netral dan imparsial, tidak terperangkap dalam dinamika politik yang dapat memecah belah, melainkan berfokus pada upaya memelihara persatuan. Netralitas ini bukan berarti menghindar dari realitas politik, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menciptakan ruang aman, di mana gereja bersikap adil. Namun, tantangan utama yang dihadapi gereja adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara netralitas dan keterlibatan yang dalam konteks politik yang kompleks.

Di satu sisi, gereja harus menghindari sikap yang terlalu pasif sehingga akan dianggap abai terhadap ketidakadilan. Di sisi lain, gereja juga harus waspada agar tidak terjebak dalam polarisasi politik yang justru dapat melemahkan kredibilitasnya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *\_conflict resolution\_* yang menekankan pentingnya aktor netral dalam memfasilitasi dialog, tetapi juga mengakui bahwa keberhasilan perdamaian seringkali

---

<sup>14</sup> O O Afolabi, ‘Why Leadership Conflict Exists in the Church: The Structural Conflict Theory Perspective’, *Journal of Applied Christian Leadership*, 15.2 (2021), pp. 90–97  
<<https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1516%5C&context=jacl>>.

bergantung pada kemampuan untuk mengatasi akar masalah, termasuk ketidaksetaraan dan ketegangan struktural yang melatarbelakangi konflik. Gereja tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mendorong perubahan sosial melalui nilai-nilai keadilan dan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, gereja dapat mengambil pelajaran dari praktik *peacebuilding interreligius*, di mana dialog tidak sekadar bertujuan untuk meredakan ketegangan sesaat, melainkan untuk membangun pemahaman bersama yang berkelanjutan<sup>15</sup>.

Peran gereja dalam konteks konflik politik harus terlibat cukup dalam untuk memahami kompleksitas masalah, tetapi juga menjaga jarak yang cukup untuk mempertahankan objektivitas. Tantangan ini hanya dapat diatasi jika gereja konsisten pada prinsip-prinsip dasarnya, yaitu keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi simbol perdamaian, tetapi juga kekuatan aktif yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Politik dalam perspektif Kristen pada hakikatnya tidak bertujuan untuk meraih kekuasaan atau mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan merupakan wujud pelayanan yang tulus bagi masyarakat luas. Esensi dari politik Kristen adalah komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, bukan sekadar ambisi kekuasaan semata. Prinsip ini berakar pada teladan Yesus Kristus yang mengajarkan nilai-nilai pelayanan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan.

Dalam praktiknya, politik Kristen menekankan pentingnya integritas moral, solidaritas dengan kaum lemah, serta tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Pendekatan ini menolak segala bentuk politik yang bersifat egois dan eksplotatif, sebaliknya mendorong keterlibatan aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, politik Kristen pada dasarnya adalah manifestasi iman yang diwujudkan melalui pelayanan konkret bagi kemaslahatan umat manusia dan seluruh alam semesta<sup>16</sup>.

Pandangan politik Jemaat Imanuel Taripa adalah politik yang yang di dalam gereja itu masih ada keterlibatan tokoh gereja dalam politik praktis yang mempengaruhi pelayanan, karena memanfaatkan kesempatan malah untuk berkampanye dalam gereja. Tetapi politik Jemaat Imanuel Taripa juga adalah

---

<sup>15</sup> Michael Daniel Driessen, ‘Interreligious Dialogue, Conflict Resolution and Peacebuilding: A Review †’, *Religions*, 16.2 (2025), doi:10.3390/rel16020150.

<sup>16</sup> Zakaria J. Ngelow, ‘Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia’, *Jurnal Jaffray*, 12.2 (2014), pp. 213–34, doi:10.25278/jj.v12i2.016.213-234.

politik yang menempatkan gereja sebagai penegah dari masalah politik yang ada, sehingga tidak akan lagi mudah masuk politik yang memecah belah jemaat.

Jemaat Imanuel Taripa menghadapi realitas politik yang kompleks di dalam gereja, di mana masih terdapat keterlibatan tokoh-tokoh gereja dalam politik praktis yang secara tidak langsung memengaruhi dinamika pelayanan. Beberapa oknum memanfaatkan kesempatan dalam kegiatan gereja untuk berkampanye atau menyebarluaskan pengaruh politik tertentu, suatu praktik yang berpotensi menggeser fokus gereja dari misi spiritualnya. Namun di sisi lain, gereja hadir sebagai penengah yang netral dalam berbagai persoalan politik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan benteng pertahanan terhadap polarisasi politik yang dapat memecah belah kesatuan jemaat. Politik Jemaat Imanuel Taripa adalah politik keseimbangan yang berusaha mengakomodasi realitas keterlibatan politik anggotanya tanpa kehilangan esensi gereja sebagai komunitas iman. Gereja tidak menolak hak warganya berpolitik, tetapi terus mengingatkan bahwa kesetiaan pada Kristus harus berjalan bersama dengan praktik politiknya.

### **Manifestasi Sikap Politik Yesus di Jemaat Imanuel Taripa**

Manifestasi merujuk pada perwujudan nyata nilai-nilai politik Yesus dalam tindakan konkret di tengah kehidupan masyarakat. Manifestasi di sini bukan hanya berarti ekspresi verbal atau teori, tetapi lebih menekankan pada bagaimana nilai-nilai seperti kasih, keadilan, pembebasan, dan keberpihakan terhadap kaum tertindas itu terlihat dan terasa secara nyata dalam sikap, perbuatan, dan pilihan Yesus selama pelayanan-Nya di dunia.

Seperti Yesus yang tidak berpolitik dalam arti praktis, Dia tidak mendirikan partai, tidak mencalonkan diri dalam pemerintahan, dan tidak memperebutkan kekuasaan. Namun, seluruh kehidupan dan ajaran-Nya merupakan manifestasi dari suatu politik yang etis, politik yang berpihak kepada manusia, terutama yang terpinggirkan. Misalnya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, bergaul dengan orang berdosa, mengkritik pemimpin agama yang munafik, atau membersihkan Bait Allah dari praktik jual-beli, semua itu adalah bentuk manifestasi dari komitmen Yesus terhadap keadilan dan kemurnian kehidupan bersama. Ia tidak tinggal diam melihat ketimpangan, melainkan bertindak sebagai pembela nilai-nilai Kerajaan Allah<sup>17</sup>. Dengan demikian, manifestasi berarti realitas yang tampak dan hidup

---

<sup>17</sup> Andheralvi Isaiah Lontoh and Kristi Esandra Tangel, ‘Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus Dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen’, *Jurnal Teologi Cultivation*, 7.2 (2023), pp. 96–111, doi:10.46965/jtc.v7i2.2275.

dari nilai-nilai Ilahi yang dihidupi dan diteladankan Yesus. Bukan sekadar doktrin atau teori, tetapi tindakan konkret dan transformatif yang berdampak pada tatanan sosial. Manifestasi politik Yesus adalah kehadiran kasih dalam dunia yang penuh kekerasan, kehadiran keadilan dalam sistem yang timpang, dan kehadiran terang di tengah gelapnya permainan kekuasaan duniawi.

Gunche Lugo menegaskan bahwa politik yang dibawa oleh Yesus adalah bentuk politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan atau jabatan, melainkan pada pembelaan terhadap kaum tertindas dan mereka yang dimarjinalkan. Ia tidak mendirikan partai politik atau terlibat dalam sistem pemerintahan formal, tetapi sikap dan tindakan-Nya, seperti menyembuhkan orang sakit, mengangkat harkat perempuan, menegur pemimpin agama yang munafik, serta memperjuangkan keadilan bagi yang tertindas merupakan manifestasi konkret dari politik yang etis dan membebaskan. Maka, pemikiran Lugo memberikan dasar teologis dan teoritis yang kokoh untuk memahami bagaimana iman Kristen dapat dan harus terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial politik, tanpa harus terjebak dalam politik kekuasaan yang sering kali manipulatif.

Oscar Cullmann, seorang teolog terkemuka yang dikutip oleh Gunche Lugo dalam bukunya, membedakan antara *politeia*, yaitu bentuk politik duniawi yang bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan, dan *politeuma*, yaitu bentuk politik surgawi yang mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat. Yesus secara sadar menolak bentuk politik *politeia*, karena politik jenis ini identik dengan manipulasi kekuasaan, dominasi, dan penindasan. Sebaliknya, Yesus memilih hidup dan bertindak berdasarkan prinsip *politeuma*, yang mengutamakan nilai keadilan, kasih, perdamaian, dan pembebasan<sup>18</sup>. Dalam konteks inilah gereja menyadari realitas bahwa sebagian tokoh dan anggotanya terlibat dalam politik praktis *politeia*, bahkan kadang membawa agenda politik mereka ke dalam kehidupan gereja. Praktik seperti penggunaan mimbar untuk kepentingan kampanye atau pemanfaatan jaringan jemaat untuk tujuan politik jelas bertentangan dengan semangat *politeuma* yang diajarkan Yesus. Namun di sisi lain, gereja tidak serta merta melarang seluruh bentuk keterlibatan politik, melainkan berusaha menciptakan ruang di mana nilai-nilai Kristiani dapat menjadi penyeimbang.

Gereja berperan sebagai penengah yang menjaga netralitas, bukan dengan menghindari politik sama sekali, tetapi dengan menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas politik harus tunduk pada nilai-nilai iman. Dengan cara ini, gereja berusaha mencegah *politeia* menguasai kehidupan jemaat, sambil membuka ruang bagi *politeuma* untuk mewujud dalam tindakan nyata. Politik

---

<sup>18</sup> Gunce Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Andi Publisher, 2009).

Yesus yang diwujudkan Jemaat Imanuel Taripa bukan berarti menghindar dari dunia politik sama sekali, tetapi tetap ikut terlibat dalam politik dengan berusaha menjaga batasan-batasan yang tidak menganggu pelayanan dalam gereja. Gereja dipanggil untuk menghadirkan suara kenabian yang mampu menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, gereja tidak bertindak sebagai kekuatan politik, tetapi ia terlibat secara kritis dan bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks kehidupan berbangsa, gereja memiliki peran untuk membentuk kesadaran politik umat agar mereka dapat menjadi warga negara yang kritis, adil, dan bertanggung jawab, serta tidak membiarkan kekuasaan berjalan tanpa arah moral. Ia harus hadir sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bersama<sup>19</sup>.

Pertanyaan mengenai apakah Yesus berpolitik seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Kristen. Namun, jika politik dipahami secara substantif sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan bersama yang adil, beradab, dan bermartabat, maka sesungguhnya Yesus telah menghadirkan suatu bentuk politik yang sangat khas dalam pelayanan-Nya. Memang benar bahwa Yesus tidak terlibat dalam politik dunia dalam pengertian praktis yakni perebutan jabatan, kekuasaan negara, atau partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan Romawi pada zamannya. Akan tetapi, seluruh tindakan, ajaran, dan keberpihakan Yesus sangat kental dengan nilai-nilai etis, yang pada hakikatnya merupakan inti dari politik moral.

Politik Yesus dapat dikategorikan sebagai politik etis atau politik moral, yang esensinya bukanlah mengejar kuasa, pengaruh sosial, ataupun jabatan formal, melainkan mengedepankan pembelaan terhadap mereka yang tertindas, pemulihan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan dalam komunitas. Dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan solidaritas yang mendalam kepada orang miskin, lemah, sakit, kaum perempuan, dan mereka yang terpinggirkan oleh struktur sosial maupun agama. Ia secara kritis menantang praktik-praktik ketidakadilan, kemunafikan, dan penindasan yang dilakukan oleh para elit agama sekaligus kekuasaan politik pada masa itu<sup>20</sup>. Dalam Alkitab tercatat dalam beberapa Injil, mengenai Yesus yang berpolitik etis, seperti dalam Injil Matius 22:21 “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu

---

<sup>19</sup> MARKUS DOMINGGUS LERE DAWA, ‘Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik’, *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 3.2 (2020), pp. 54–78, doi:10.47596/solagratis.v3i2.40.

<sup>20</sup> H P Sahardjo, ‘Orang Kristen Dan Kehidupan Politik’, *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 3.2 (2021), pp. 217–27 <<https://doi.org/10.51828/td.v3i2.96>>.

berikan kepada Allah”, yang berarti Yesus mengakui adanya otoritas pemerintahan dunia ini yang sah dengan menyebut hak Kaisar untuk menerima apa yang menjadi miliknya.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa sebagai warga negara, ada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi terhadap pemerintah yang sah, namun secara bersamaan, Yesus juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap otoritas pemerintah tidak boleh mengabaikan atau mengurangi kewajiban manusia terhadap Allah. Dalam Injil Yohanes 18:36 “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini”, yang memiliki arti bahwa Yesus menolak penggunaan cara-cara dunia ini untuk mencapai tujuan-Nya, kerajaan yang Dia dirikan bersifat rohani, berpusat pada kedaulatan Allah, bukan pada kekuasaan manusia, nilai yang mengutamakan kasih, kebenaran, dan pelayanan, bukan dominasi atau kekerasan.

Dalam Injil Lukas 4:18-19 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas”, ini mempunyai arti bahwa Yesus secara khusus menyebut kelompok-kelompok marginal sebagai penerima utama pelayanan-Nya, seperti orang miskin yang terpinggirkan, mereka yang sakit baik secara harfiah maupun spiritual, dan mereka yang tertindas oleh sistem yang tidak adil, semua menjadi fokus pelayanan Yesus. Penyataan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Allah yang diwaktukan Yesus memiliki keadilan sosial yang kuat. Bukti nyata dari Alkitab, dapat memperlihatkan bahwa Yesus juga ikut berpolitik. Yesus hadir sebagai sosok yang mengganggu ketenangan penguasa dan sistem yang menindas, bukan karena Ia ingin merebut posisi politik, tetapi karena nilai-nilai Kerajaan Allah yang Ia bawa bertentangan dengan nilai-nilai kekuasaan dunia yang menindas dan eksploratif. Umat Kristen dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan berpolitik sebagai bagian dari panggilan iman. Politik dilihat bukan hanya sebagai ruang perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk menghadirkan kebaikan bersama<sup>21</sup>.

Dalam pandangan Calvin, politik berkaitan dengan negara, dan ketika Gereja berpolitik, artinya Gereja menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah untuk menghadirkan damai sejahtera (shalom) di tengah masyarakat. Namun, Gereja tidak seharusnya terlibat langsung dalam partai politik atau memihak

---

<sup>21</sup> Ferdinand Samuel Manafe, ‘Sikap Kristen Dalam Arena Politik’, *Missio Ecclesiae*, 6.1 (2017), pp. 1–16, doi:10.52157/me.v6i1.66.

salah satu partai, melainkan tetap fokus pada tugas rohani dan pembinaan umat. Gereja sesungguhnya telah terlibat dalam politik secara hakiki ketika menjalankan perannya sebagai garam dan terang dunia, sesuai ajaran Yesus Kristus. Sebagai garam, Gereja memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang halus namun nyata, memelihara persatuan bangsa, serta melawan berbagai bentuk kerusakan moral seperti praktik korupsi dan ketidakadilan sosial. Sebagai terang, gereja dituntut untuk menunjukkan integritas dan menjadi teladan dalam kehidupan publik. Di tengah dunia yang sering kali dikuasai oleh kepentingan-kepentingan dunia, gereja hadir untuk memberikan harapan dan menuntun masyarakat menuju kebenaran. Kehadirannya bukan untuk memperjuangkan kekuasaan politik praktis, melainkan untuk menyinarkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>22</sup>. Gereja sebagai komunitas iman, tidak hidup dalam ruang yang terpisah dari kehidupan sosial dan politik suatu negara. Gereja selalu berada di tengah realitas masyarakat dan berinteraksi dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya, termasuk dinamika politik dan pemerintahan. Hubungan antara gereja dan negara bukan sekadar hubungan antara dua institusi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan interaksi yang menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual gereja terhadap kehidupan bangsa. Gereja memiliki peran profetik, yaitu menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Peran ini mengharuskan gereja untuk tidak bersikap netral terhadap situasi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara<sup>23</sup>.

Politik Yesus berakar pada visi Kerajaan Allah, sebuah tatanan hidup baru yang didasarkan pada kasih, keadilan, pengampunan, dan kedamaian. Kerajaan Allah yang Ia waktakan bukan hanya menyangkut dimensi surgawi, tetapi juga menyentuh aspek nyata dari kehidupan manusia sehari-hari. Ia memanggil setiap orang untuk bertobat, tidak hanya secara pribadi tetapi juga dalam sikap sosial, agar hidup bersama menjadi lebih adil dan bermartabat<sup>24</sup>. Dengan demikian, manifestasi politik Yesus adalah suatu perlawanan terhadap sistem yang menindas tanpa harus menggunakan kekuatan senjata. Ia melawan dengan kasih, menghadapi kekuasaan dengan keberanian moral, dan

---

<sup>22</sup> Clements, ‘Political Hybridity and Human Security in Post-colonial and Post-conflict State Building’.

<sup>23</sup> Yohanis Udju Rohi, ‘Misi Gereja Melalui Dunia Politik’, *Missio Ecclesiae*, 6.1 (2017), pp. 32–55, doi:10.52157/me.v6i1.68.

<sup>24</sup> Gerli Safira Petonangan and others, ‘KAJIAN TEOLOGIS GEREJA DAN POLITIK: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer’, *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual*, 1.1 (2024), pp. 43–57, doi:10.70420/theosebia.v1i1.23.

memperjuangkan keadilan dengan kerendahan hati. Politik yang Yesus bawa adalah politik yang membebaskan, bukan menindas, tetapi yang mempersatukan, bukan memecah belah, tetapi yang mengangkat martabat manusia, bukan menjatuhkannya. Jemaat Imanuel Taripa telah menampakkan manifestasi politik Yesus dalam kehidupannya sebagai komunitas iman. Upaya menjaga netralitas, menjaga pelayanan agar tetap murni dari agenda kekuasaan, serta menanamkan nilai-nilai kasih dan keadilan dalam kehidupan sosial-politik merupakan bukti nyata bahwa ajaran politik Yesus benar-benar menjadi acuan dalam praktik gereja. Gereja tidak menutup mata terhadap realitas sosial-politik yang dihadapi jemaat, bahkan secara sadar mengambil posisi sebagai penengah yang netral dan imparsial dalam konflik politik yang muncul di dalam maupun di luar gereja. Peran ini selaras dengan ajaran politik Yesus yang tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan duniawi, tetapi lebih pada nilai-nilai keadilan, kasih, pembebasan, dan pembelaan terhadap kaum tertindas.

## Kesimpulan

Jemaat Imanuel Taripa tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh politik yang hadir di tengah kehidupan bergereja. Politik tidak selalu membawa dampak negatif, tetapi dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kasih, dan pembebasan sebagaimana diteladankan oleh Yesus. Meski terdapat oknum yang menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi, jemaat secara keseluruhan tetap berupaya menjaga kemurnian pelayanan dari pengaruh politik praktis. Gereja hadir sebagai penengah yang menjaga kesatuan jemaat dan memelihara harmoni di tengah perbedaan pandangan. Dengan menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar sikap dan tindakan, Jemaat Imanuel Taripa telah memperlihatkan bentuk nyata dari manifestasi politik Yesus dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Politik dalam gereja tidak harus dihindari, tetapi perlu diarahkan agar selaras dengan misi kasih dan keadilan yang menjadi ciri khas pelayanan Kristen.

## Referensi

- Afolabi, O O, ‘Why Leadership Conflict Exists in the Church: The Structural Conflict Theory Perspective’, *Journal of Applied Christian Leadership*, 15.2 (2021), pp. 90–97  
<<https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1516%5C&context=jacl>>
- Apner, Grets Janaldi, ‘Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran

- Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia', *Jurnal Teologi Cultivation*, 6.1 (2022), pp. 1–22, doi:10.46965/jtc.v6i1.709
- Clements, Kevin P, 'Political Hybridity and Human Security in Post-colonial and Post-conflict State Building', in *Human Security in World Affairs: Problems and Opportunities*, ed. by A K Lautensach and S W Lautensach, 2nd edn (BCcampus & UNBC, 2020)  
<<https://opentextbc.ca/humansecurity/chapter/political-hybridity/#8.6>>
- Driessen, Michael Daniel, 'Interreligious Dialogue, Conflict Resolution and Peacebuilding: A Review †', *Religions*, 16.2 (2025),  
doi:10.3390/rel16020150
- James, 'ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya Partisipasi Orang Kristen Dalam Perpolitikan Di Indonesia', *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 2.2 (2016), pp. 187–91
- Kumowal, Royke Lantupa, Sekolah Tinggi, and Teologi Anderson, 'ATAS DAMPAKNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN JEMAAT', no. April (2025), pp. 52–73
- Kwirinus, Dismas, 'Awam Politis Dan Tugas Kritis-Profetis', *Jurnal Masalah Pastoral*, 11.2 (2023), pp. 96–122,  
doi:10.60011/jumpa.v11i2.138
- LERE DAWA, MARKUS DOMINGGUS, 'Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik', *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 3.2 (2020), pp. 54–78, doi:10.47596/solagratis.v3i2.40
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, and Kristi Esandra Tangel, 'Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus Dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen', *Jurnal Teologi Cultivation*, 7.2 (2023), pp. 96–111,  
doi:10.46965/jtc.v7i2.2275
- Lugo, Gunce, *Manifesto Politik Yesus* (Andi Publisher, 2009)
- Manafe, Ferdinand Samuel, 'Sikap Kristen Dalam Arena Politik', *Missio Ecclesiae*, 6.1 (2017), pp. 1–16, doi:10.52157/me.v6i1.66
- Ngelow, Zakaria J., 'Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia', *Jurnal Jaffray*, 12.2 (2014), pp. 213–34, doi:10.25278/jj.v12i2.016.213-234
- Pasambaka, Yuliana, 'Wawancara Tentang Teologi Politik Di Jemaat Imanuel Taripa' (wawancara pribadi, 2025)
- Petonangan, Gerli Safira, and others, 'KAJIAN TEOLOGIS GEREJA DAN POLITIK: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer', *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual*, 1.1 (2024), pp. 43–57,  
doi:10.70420/theosebia.v1i1.23

- Putra, Adi, and others, ‘Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja’, *Saint Paul’S Review*, 3.1 (2023), pp. 78–92, doi:10.56194/spr.v3i1.40
- Rerung, A E, and J Attu, ‘Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale’, *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4.1 (2023), pp. 1–17 <<https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>>
- Rohi, Yohanis Udju, ‘Misi Gereja Melalui Dunia Politik’, *Missio Ecclesiae*, 6.1 (2017), pp. 32–55, doi:10.52157/me.v6i1.68
- Sahardjo, H P, ‘Orang Kristen Dan Kehidupan Politik’, *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 3.2 (2021), pp. 217–27 <<https://doi.org/10.51828/td.v3i2.96>>
- Simamora, Adolf Bastian, ‘Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia’, *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 2.1 (2019), doi:10.36972/jvow.v2i1.16
- Subu, Yan Yusuf, ‘Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 7.1 (2019), pp. 1–15, doi:10.60011/jumpa.v7i1.85
- Tahamata, M F, and A Supratikno, ‘Peran Politik Gereja Dalam Tahun Politik 2024’, *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 13.2 (2024), pp. 227–48 <<https://doi.org/10.51828/td.v13i2.386>>
- Tokede, Kristofel, ‘Wawancara Tentang Strategi Politik Yesus Dalam Konteks Jemaat’ (wawancara pribadi, 2025)
- Zai, Nikarni, and Junidar Gulo, ‘Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih’, *Imitatio Christo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1.1 (2024), pp. 30–45, doi:10.63536/imitatiochristo.v1i1.4